

**Created by PDF Combine Unregistered Version**

**If you want to remove the watermark, Please register**

**Created by PDF Combine Unregistered Version**

**If you want to remove the watermark, Please register**



# Ushuluddin

Jurnal Pemikiran Islam, Kewahyuan, Politik & Hubungan Antar Agama

---

**ILMU-ILMU USHULUDDIN DI TENGAH ARUS  
PERUBAHAN ISLAM DAN GLOBALISASI**

---

**KEADILAN SOSIAL DALAM ISLAM :  
TELAAH PEMIKIRAN SAYYID QUTUB**

---

**PEMIKIRAN POLITIK AL FARABI :  
ANALISIS KONSTEKTUAL**

---

**PEMIKIRAN TOKOH TASAWUF**

---

**PEMIKIRAN QURAISH SHIHAB  
TENTANG MASYARAKAT PLURALISTIK**

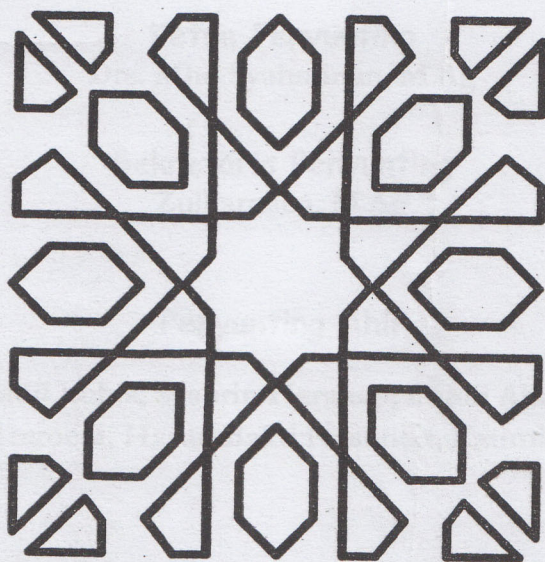
---

Fakultas Ushuluddin  
Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara  
Medan  
2010



# USHULUDDIN

Jurnal Pemikiran Islam, Kewahyuan, Politik dan Hubungan Antar Agama



Ushuluddin, *Jurnal Pemikiran Islam, Kewahyuan, Politik dan Hubungan Antar Agama* diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara sebagai media kreativitas dan produktivitas ilmiah yang menyajikan kajian-kajian aktual berkenaan dengan filsafat, Quran-Hadis politik dan kerukunan antar umat beragama.

# **U S H U L U D D I N**

Jurnal Pemikiran Islam, Kewahyuan, Politik dan Hubungan Antaragama

---

## **Pengarah**

Dekan Fakultas Ushuluddin

## **Penanggung Jawab**

Drs. Parluhutan Siregar, M.Ag

Dra. Hj Rosmaini. MA

## **Ketua Penyunting**

Drs. Mhd Syahminan. M.Ag

## **Sekretaris Penyunting**

Zulkarnaen, M.Ag

## **Penyunting Ahli**

Ahmad Fadil Lubis, Syahrin Harahap, Ramli Abdul Wahid  
Amroeni, Hasan Bakti Nasution, Katimin.

## **Alamat**




Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara  
JL. Willièm Iskandar Psr V Medan Estate Tel (061) 6622925  
FAX 661583 e-mail: fu\_iainsu@yahoo.co.id

NB. Menerima karya ilmiah berupa artikel konseptual atau executive summary laporan penelitian. Diserahkan/dikirim dalam bentuk CD dan ditulis dengan font Garamond size 13, 1,5 Spasi dan  $\pm$  15-20 halaman ukuran Quarto





<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>( i )</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>( ii )</b>







## TEMA Utama

 Ilmu-ilmu Ushuluddin Di Tengah Arus Perubahan Islam Dan Globalisasi <i>Hasyimsyah Nasution.....</i>	<b>(1-12)</b>
 Hermeneutika Alquran Khaled Abou el Fadl <i>Arifinsyah .....</i>	<b>(13-26)</b>
 Teologi Lingkungan Hidup:Konsep Dasar Teologi Islam Dalam Menata Alam Lingkungan Hidup <i>Hadis Purba.....</i>	<b>(27-38)</b>





## KAJIAN SUMBER

 Pandangan Alquran Tentang Waktu:Pendekatan Tafsir Tematik Abdul Halim .....	<b>(39-49)</b>
 Konsep imam Menurut Persepektif Alquran Pendekatan Tafsir Maudhu'i <i>Zulkarnaen.....</i>	<b>(50-62)</b>



## KAJIAN POLITIK DAN SOSIAL

 Pemikiran Politik al Farabi:Analisis Kosntektual <i>Mhd. Syahminan .....</i>	<b>(63-73)</b>
 Sistem Pemerintahan Islam:Persepektif Imam Khomeini <i>Wirman.....</i>	<b>(74-87)</b>
 Islam dan Demokrasi <i>Abdul Razak.....</i>	<b>(88-100)</b>
 Kajian Tentang Politik Hukum dan Ajaran Agama Golongan Khawarij <i>Ahmad Sanusi Lukman.....</i>	<b>(101-113)</b>
 Keadilam Sosial Dalam Islam:Telaah Pemikiran Sayyid Quthub <i>Hasan Bakti Nasution .....</i>	<b>(114-127)</b>
 Gerakan-gerakan Spritualitas Dalam komunitas Muslim <i>Abdul Hamid Ritonga.....</i>	<b>(128-141)</b>

## METODOLOGI

-  Hubungan Agama dan Sains  
*Adenan*..... (142-149)
-  Menggagas Perguruan Tinggi Berwawasan Iptek dan Religius Dalam  
 perspektif Islam  
*Sulidar*..... (150-163)
-  Pemikiran Fiqih Tasawuf  
*Musaddad Lubis*..... (164-172)
-  Daud Abdullah al-Fatani Sufi, Perjalanan Rohani Menuju Insan Kamil  
*Lindung Hidayat Siregar*..... (173-184)

## Hubungan Antar Agama

-  Pemikiran Quraish Shihab Tentang Masyarakat Pluralistik  
*Abdullah AS* ..... (185-198)
-  Biodata Penulis Pada Edisi Ini ..... (199-201)



# SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT IMAM KHOMEINI

WIRMAN

## Abstract

The concept of *wilayah al faqih* with spreaded by Imam Khomeini, gives the power application in Islamic government in the three parts of state, such: executive, legislative and judiciary. Although Khomeini just speaks about the *faqih*. Holding the highest power, all the government sector is involved in this position as a *mujtahid*

## Kata Kunci: Pemerintahan Islam, wilayah al-faqih dan Dinasty

Sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang merupakan hasil elaborasi dari gagasannya tersebut (*wilayah al-faqih*), terbukti jauh lebih *viable* dibanding dengan yang diduga oleh banyak orang sebelumnya. Sistem ini juga telah menjadi topik yang unik dan sangat kontroversial dalam wacana keislaman, khususnya di bidang politik. Ironisnya Republik Islam Iran adalah negara pertama dan satu-satunya di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang berhasil didirikan dalam masa kontemporer, justru ketika banyak kalangan Islam cenderung untuk meninggalkan konsep negara Islam.<sup>1</sup>

konsep *wilayah al-faqih* yang dikembangkan oleh Imam Khomeini, membagi kekuasaan pelaksanaan pemerintahan Islam kepada tiga lembaga negara, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Meskipun demikian menurut Khomeini dalam konsep *wilayah al-faqih*, hanya *faqih* yang memegang otoritas yang tertinggi, semua kekuasaan bersumber dari kedudukannya sebagai *mujtahid* tertinggi yang memiliki kewenangan terbesar dalam penafsiran sumber hukum.

Setelah runtuhnya Dinasti Qajar pada tahun 1925 dan kemudian digantikan dengan Dinasti Pahlevi yang dipimpin oleh Reza Syah Pahlevi. Pada akhir 1920-an Reza Syah, seorang perwira militer, merebut kekuasaan dan mendirikan Dinasti Pahlevi. Terimbas oleh langkah rekan sezamannya di Turki, Mustafa Kemal (Ataturk) yang memusatkan

---

<sup>1</sup>Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), hlm. 42.



perhatiannya pada modernisasi dan pembentukan pemerintahan terpusat yang kuat mengandalkan angkatan bersenjata dan birokrasi modern.<sup>1</sup> Berbeda dengan Atatürk, Syah tidak menghapuskan lembaga-lembaga keagamaan, tetapi hanya membatasi dan mengontrol mereka.<sup>2</sup>

Sejak itu Iran mengalami proses pembentukan negara bangsa yang serupa dengan proses yang berlangsung di Turki dan sejumlah negara lain.<sup>3</sup> Negara menjadi motor perkembangan ekonomi serta perkembangan kebudayaan menurut model Barat. Namun berbeda dengan Turki golongan menengah menjadi kelas penopang utama bagi rezim Pahlavi. Selain itu Syah juga mengembangkan angkatan bersenjata baru yang lebih kuat. Banyak ulama yang mendukung pengambilalihan kekuasaan oleh Reza Syah guna memulihkan monarki yang kuat untuk meredam pengaruh asing.<sup>4</sup>

#### PEMIKIRAN IMAM KHOMEINI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN

Beberapa pikiran Ayatullah Imam Khomeini yang relevan mengenai system pemerintahan dengan konteks keterkaitan antara agama dan politik dalam mazhab Syi'ah, khususnya masalah kepemimpinan dan

<sup>1</sup>Mustafa Kemal Atatürk, merupakan penggagas modernisme di Turki disebut juga bapak pendiri Republik Turki, melakukan serangkaian pembaharuan politik dan modernisasi politik dengan berupaya mendirikan sebuah negara bangsa yang modern yang cenderung ke demokrasi sosial yaitu gagasan yang berasal dari Eropa reformasi yang dicangkokkan pada Turki merdeka melalui dua konsep komplementer: semangat kontemporer dan Nasionalisme. Lihat M. Naim Turfan, entri "Mustafa Kemal Atatürk", dalam Esposito, *Ensiklopedi*, hlm. 217-219.

<sup>2</sup>Esposito, *Demokrasi*, hlm. 68-69.

<sup>3</sup>Perlu diketahui bahwa pembentukan negara bangsa di Iran merupakan imbas dari beberapa revolusi yang terjadi di Barat. Seperti yang dikemukakan Lapidus, bahwa revolusi Perancis dan revolusi Amerika sama-sama mengakibatkan perubahan besar di bidang politik dan kecakapan bernegara. Mereka membidani kelahiran negara kebangsaan modern yang dibangun berdasarkan persamaan dan partisipasi relatif warga negara, kekentalan identifikasi penduduk dengan kultural politik, nasional. Mereka juga memprakarsai pembentukan institusi parlemen yang memungkinkan penyebaran perwakilan politik, dan struktur negara yang menggabungkan penggunaan kekuasaan dan kepentingan otonomi earga dan kebebasan politik masing-masing warga negara: Lapidus, *Sejarah*, hlm. 6.

<sup>4</sup>Meuleman, Johan Hendrik, *Dinamika Abad Ke-20*, dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 6* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 30.



bagaimana implementasi dari konsep ini ke dalam kehidupan sosial-politik, di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

Imam Husein memberontak dan menjadi martir guna mencegah berdirinya monarki dan pewarisan takhta yang turun temurun. Karena itu, kaum Muslim hendaknya “menciptakan Asyura” dalam perjuangan mendirikan negara Islam.

Islam bersifat Politis, karena Alquran memuat lebih banyak, ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah-masalah sosial daripada soal-soal ibadah. Dari 50 buku hadis, barangkali hanya ada tiga atau empat yang membahas masalah shalat dan kewajiban manusia terhadap Tuhan, dan sebagian kecil mengenai moralitas. Selebihnya selalu ada sangkutpautnya dengan masalah-masalah sosial, ekonomi, hukum, dan politik, oleh sebab itu, Islam tidak hanya mengatur masalah hubungan antara Tuhan dan makhluk-Nya.

Pemisahan agama dan politik serta adanya tuntunan agar ulama tidak ikut campur dalam masalah sosial politik merupakan propaganda imperialisme. Para ulama yang enggan melibatkan diri dalam masalah sosial-politik sama saja dengan menolak kewajiban dan misi yang didelegasikan kepada mereka oleh para imam. Mereka yang ingin mengecilkan kekuasaan para ulama dan menghancurkan kehormatan mereka di antara rakyat banyak adalah “pengkhianat besar negara”.

Para *faqih* memiliki hak sebagai wakil imam dalam semua aspek keagamaan, sosial, dan politik.

Persatuan Sunni-Syi'ah merupakan hal penting kaum Syi'ah hendaknya meninggalkan keengganan mereka yang telah mendarah daging untuk shalat dibelakang imam-imam Sunni, merupakan “sebuah perserikatan antara kaum Sunni dan Syi'ah, serta antara pemerintah dan rakyat diwujudkan di Iran”

---

<sup>5</sup>Zainuddin, *Syi'ah*, hlm. 58-61 yang dikutip dari berbagai sumber seperti, Enayat, *Reaksi*, hlm. 79 dan 301; Mortimer, *Islam dan Kekuasaan*, hlm. 307-310; Ayatullah Ruhullah Khomeini, “Sebuah Pandangan Mengenai Pemerintahan Islam” dalam *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, editor: Salim Azzam (Bandung: Penerbit Mizan, 1983), hlm. 117; Shireen T. Hunter, “Islam in Power: The Case of Iran”, dalam *The Politic of Islamic Revivalism*, editor: Shireen T. Hunter (Bloomington: Indiana University Press, 1983), hlm. 268 dan 278; Ringkasan Biografi, Pidato-Pidato & Wasiat Imam Khomeini (Jakarta: Kedutaan Besar Iran, 1989). Hlm. 70; Esposito, *Islam dan Polittk*, terj. Jusup Soe'yb, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 198; David Menhasri, *Iran: A Decase of War and Revolution* (New York: Holmes & Meier, 1990), hlm. 15; *Wasiat Imam Khomeini* (Jakarta: Kedutaan Besar Iran, 1989), hlm. 12; Ayatullah Khomeini, *Islamic*, hlm. 47-77; H.E. Chehabi, “Religion and Politics in Iran”. *Deadalus*, Vol. 120, No. 3 (Summer, 1991), hlm. 73, dan Riza Sihbudi, *Biografi*, hlm. 66.



Negara Islam akan menjamin keadilan sosial, demokrasi yang sebenarnya, dan kemerdekaan yang murni dari imperialisme. Islam dan pemerintahan Islam adalah fenomena Ilahi, yang menjamin kebahagiaan manusia dan keturunannya di dunia dan akhirat.

Alquran hanya memuat hukum Tuhan. Karenannya, yang berkewajiban melaksanakan hukum tersebut dan dapat memerintah dengan adil adalah penguasa yang dipilih para *mujtahid* saja, yang mengenal perintah Tuhan dan mengamalkan keadilan tanpa terpenjara oleh tekanan dan ambisi dunia.

Sebuah sistem pemerintahan yang mengamalkan hukum Tuhan, yang mendapatkan pengawasan yang mendapatkan pengawasan dari hukum agama (*faqih*), akan mengguguli semua sistem pemerintahan yang tidak adil di dunia ini.

Pembagian ummah menjadi beberapa bangsa merupakan sesuatu yang pantas disesali, dan itu adalah hasil kerja kolonialisme, serta para penguasa lalim dan serakah. Salah satu tugas pemerintahan Islam adalah mempersatukan ummah untuk membebaskan wilayah mereka dari cengkraman pemerintahan yang menjadi perantara kolonialis.

Hukum Islam menyediakan suatu "cetak biru" bagi negara dan masyarakat, di mana eksekutif bertugas melindungi dan mengawal, sedangkan yudikatif berfungsi menerapkan hukum Islam tersebut. Sementara itu, legislatif tidak diperlukan karena hanya Tuhan yang berwenang membuat undang-undang dan kaum Muslim pada hakikatnya sudah memiliki hukum-Nya.

Pemerintahan Islam, merupakan sesuatu yang mungkin dan penting, seperti yang dinyatakan oleh Imam al-Ridha (Imam Kedelapan) bahwa "tidak logis kalau Tuhan Yang Mahatinggi dan Mahabijaksana membiarkan rakyat-Nya, makhluk-Nya, tanpa mendapat petunjuk atau pelindung". Kebijakan Tuhan tidak dapat dibatasi hanya dalam ruang dan waktu tertentu saja. Karena itu, sejak sekarang sampai akhir masa nanti sangatlah diperlukan seorang imam yang dapat melaksanakan hukum-hukum Islam.

Alasan-alasan yang mendorong terpilihnya 'Ali sebagai imam masih dipakai hingga kini; orangnya berubah, tapi fungsinya tetap sama. Pemerintahan Islam masa kini harus merupakan "pengganti 'Ali". Pemerintahan itu harus konstitusional, tapi dalam pengertian bahwa para penguasa harus menyadari sejumlah syarat yang didefinisikan di dalam Alquran dan Hadis.



Mulla Ahmad Naraqi (w. 1829) dan Syeikh Muhammad Husein Na'ini (w. 1936) adalah dua tokoh yang memiliki pandangan serupa bahwa kaum ulama mempunyai hak prerogratif di bidang politik, kendati keduanya tidak mengembangkan suatu tema sentral teori politik mereka.

Para *faqih* harus memegang kekuasaan, menggantikan peran raja (penguasa). Kendati masalah-masalah teknis bisa diserahkan kepada para ahlinya, namun pemegang kekuasaan tertinggi di bidang sosial-politik harus berada di tangan *faqih* yang adil.

Pemerintahan Islam adalah pemerintahan rakyat dengan berpegang pada hukum Tuhan, Kepala Pemerintahan, pemimpin tertinggi haruslah seorang *faqih*, seorang ahli hukum Tuhan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam pemerintahan Islam, kaum ulama menduduki posisi, baik sebagai pengawal (*guardians/vali*), penafsir (*interpreters*), maupun pelaksana (*executors*) hukum-hukum Tuhan. Oleh sebab itu, pemerintahan yang demikian merupakan pemerintahan Islam yang sebenarnya dan adil.

Pemerintahan Islam harus bertindak sesuai dengan syariat, dan karenanya dibutuhkan pengetahuan yang luas mengenai syariat dalam mana semua tindakan harus sesuai dengannya. Syarat-syarat ini hanya bisa dipenuhi oleh para *faqih*, pakar di bidang hukum Islam. Karenanya *faqih* adalah figur yang paling siap untuk memerintah masyarakat Islam. Inilah sebenarnya gagasan inti *wilayah al-faqih*. Sebagai penguasa, *faqih* memiliki otoritas yang sama dan dapat menjalankan fungsi sebagai imam, walaupun dia tidak dengan sendirinya sama dengan imam. Dalam hal ini, tidak ada tempat bagi para raja atau penguasa-penguasa temporal lainnya.

Selama gaibnya Imam Mahdi tidak berarti berhentinya peran politik umat Syi'ah. Dalam rangka membangun masyarakat dan negara Islam, kaum Muslim tidak boleh menunggu sampai kembalinya Imam Mahdi.

Pemerintahan Islam yang benar adalah sebuah pemerintahan konstitusional dengan Alquran dan Hadis sebagai konstitusinya.

Dari pandangan-pandangan Imam Khomeini di atas dapat ditarik titik temu bahwa konsep *wilayatul faqih* sangat mengartikulasikan gagasan esensial dari Imam Khomeini tentang negara dan tujuan yang ingin dicapainya. *Wilayatul faqih* juga merupakan "cetak biru" bagi suatu sistem pemerintahan Islam Iran modern.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Zainuddin, *Syi'ah*, hlm. 61.



## PEMBAGIAN KEKUASAAN

Mengenai bentuk pemerintahan dan pembangian kekuasaan Iran, semenjak kemenangan revolusi Islam tahun 1979, Imam Khomeini dan para *founding father* Republik Islam Iran dengan penuh kesadaran memilih bentuk republik dan pembagian kekuasaan "*trias politica*". Di satu sisi jelas ini merupakan bukti bahwa mereka tidak tertutup dari gagasan politik baru, di sisi lain ini merupakan bantahan terhadap tuduhan bahwa para tokoh revolusi Iran bermaksud menarik Iran mundur ke jaman abad pertengahan. Sistem ini dipilih tentu saja karena pemerintahan ini dianggap bisa menjadi wadah bagi pemahaman mereka mengenai tata cara pengaturan negara modern yang sejalan dengan konsep Islam mengenai masalah ini<sup>7</sup>. Meskipun dalam kenyataannya ada banyak hal penting yang perlu diperhatikan.

Konsep republik, sebagaimana diterapkan dalam Republik Islam Iran, telah dimodifikasikan dengan konsep kepemimpinan *wilayatul faqih*, atau pemerintahan para ulama. Modifikasi ini menyentuh ketiga sendi pembagian kekuasaan, meliputi institusi-institusi "eksekutif, legislatif, dan yudikatif" yang biasa disebut *Trias Politika*. Hal ini dirasa perlu, mengingat pada sistem ini konsep kepemimpinan Islam - apakah itu namanya wilayah atau imamah - tidak cukup terwakili di dalamnya. Ada batas-batas, sebagaimana diatur menurut konsep *Trias Politika*, yang didalamnya kekuasaan eksekutif ditundukan oleh kekuasaan legislatif. Demikian pula kekuasaan yudikatif mempunyai batas-batasnya sendiri yang membuat mereka tidak leluasa untuk menerapkan hukum Islam<sup>8</sup>.

Dalam hal persetujuannya dengan konsep demokrasi, di mana ditunjukkan dengan istilah-istilah "republik", konstitusi, parlemen dan pemilu yang ada dalam system pemerintahan Republik Islam saat ini bukan terletak pada kesepakatannya secara substansial mengenai makna sebagaimana dipahami Barat. Menurut Khomeini sekalipun pemerintahan ini adalah pemerintahan rakyat, tetapi sumber hukum berasal dari Tuhan. Karena itu konstitusi maupun peraturan perundang-undangan haruslah mengacu kepada hukum-hukum Tuhan, yang tertera pada al-Qur'an dan Hadis serta Ijtihad ulama dalam hal ini *faqih*.

Menurut Imam Khomeini, negara Islam adalah negara hukum. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan konstitusional, namun pengertian konstitusional dengan negara hukum di sini berbeda dengan apa yang selama

<sup>7</sup> Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), hlm. 127

<sup>8</sup> *Ibid.*



ini dikenal. Pengertian konstitusional yang merujuk pada “hukum yang disesuaikan dengan pendapat mayoritas”, tidak dikenal dalam sistem pemerintahan Islam, karena dalam pemerintahan Islam hukum sudah ada, yaitu hukum Tuhan. Dengan kata lain Tuhanlah pemegang kekuasaan legislatif-disamping sebagai pemegang kedaulatan- tertinggi yang sebenarnya, bukan parlemen.<sup>9</sup>

Singkatnya di dalam pemerintahan Islam, jika kekuasaan eksekutif dan legislatif ada pada *faqih* atau *fuqaha* yang menjalankan fungsi selaku wakil para Imam, maka kekuasaan legislatif sepenuhnya berasal dari hukum Tuhan. Oleh sebab itu pemerintahan Islam juga disebut sebagai pemerintahan hukum Tuhan atas manusia. Tetapi, bukan berarti tidak diperlukan adanya parlemen. Parlemen diperlukan guna “menyusun program untuk berbagai kementerian berdasarkan ajaran Islam dan menentukan bentuk pelayanan pemerintahan.”<sup>10</sup>

Sesuai dengan tujuan dan misinya, pemerintahan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: (1) mempertahankan lembaga-lembaga hukum Islam; (2) melaksanakan hukum Islam; (3) membangun kembali tatanan yang adil; (5) memungut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran Islam; (6) menentang segala bentuk agresi, mempertahankan kemerdekaan dan integritas teritorial tanah Islam; (7) memajukan pendidikan; (8) memberantas korupsi dan segala jenis penyakit sosial lainnya; (9) memberikan perlakuan yang sama terhadap semua warga negara tanpa diskriminasi; (10) memecahkan masalah kemiskinan; dan (11) memberi pelayanan kemanusiaan secara umum.<sup>11</sup>

Kekuasaan tertinggi dalam struktur politik Republik Islam Iran, berada di tangan Imam (pemimpin dalam arti pemimpin spiritual bukan imam sebagaimana keyakinan umat Syi’ah) atau dewan kepemimpinan (*Syura-e-rahbari*). Hal ini memang sesuai dengan mazhab ajaran Syi’ah yang menerapkan prinsip imamah (keimaman) sebagai salah-satu ajaran utamanya.<sup>12</sup> Pasal 5 Konstitusi Iran 1979 menyebutkan:

“Selama ketidakhadiran Imam yang kedua belas (semoga Allah mempercepat kedatangannya, dalam Republik Islam Iran, kepemimpinan

<sup>9</sup> Ayatullah Ruhullah Khomeini, “Sebuah Pandangan Mengenai Pemerintahan Islam” dalam *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, editor: Salim Azzam (Bandung: Penerbit Mizan, 1983), hlm. 128 dan Abd. Rahman Zainuddin dan dan M. Hamdan Basyar, *Syi’ah Dan Politik Di Indonesia: Sebuah Penelitian* (Bandung: Penerbit Mizan, 2000), hlm. 62.

<sup>10</sup> Zainuddin, *Syi’ah*, hlm. 62.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>12</sup> Sihbudi, *Biografi*, hlm. 61.



urusan-urusan dan pimpinan ummat merupakan tanggung jawab dari seorang *faqih* (ahli hukum Islam) yang adil dan taqwa, mengenai zaman, pemberani, giat dan berinisiatif yang dikenal dan diterima oleh mayoritas ummat sebagai imam (pemimpin) mereka. Apabila *faqih* seperti itu tidak mempunyai mayoritas semacam itu, suatu Dewan Pimpinan yang terdiri dari para *fuqaha* yang memenuhi syarat-syarat tersebut diatas akan memegang tanggungjawab itu”.

Selanjutnya dalam pasal 107 disebutkan antara lain,

“Jika seseorang ahli agama memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 5...sebagaimana halnya otoritas keagamaan yang menonjol (*marja'i*) dan pemimpin Revolusi Ayatullah Uzma Imam Khomeini. Pemimpin ini berkedudukan *wilayatul faqih*...apabila tidak demikian halnya maka tiga atau lima *marja'i* yang memenuhi syarat-syarat kepemimpinan akan dipilih untuk jabatan anggota dewan pimpinan dan diperkenalkan kepada rakyat”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut. Jelas kekuasaan tertinggi di Republik Islam Iran berada di tangan Imam. Semasa hidupnya Khomeini selain berkedudukan sebagai Imam, juga sebagai *wilayatul faqih*. Kekuasaan Imam atau pemimpin tidak diperoleh melalui suatu pemilihan umum, tetapi melalui suatu aklamasi dari rakyat. Ayatullah Imam Khomeini, misalnya muncul sebagai penguasa tertinggi, karena dinilai berhasil memimpin revolusi Islam yang menggulingkan rezim monarki Syah Iran dan membentuk sebuah republik Islam, sehingga Khomeini juga mendapat gelar sebagai “Pemimpin Revolusi Islam Iran” dan “Bapak Pendiri Republik Islam Iran”.<sup>13</sup> Meskipun demikian walaupun Khomeini tidak memegang jabatan formal, baik sebagai Presiden ataupun Perdana Menteri, tetapi kekuasaan Khomeini sangatlah besar.<sup>14</sup>

Pada masa Kekuasaan Imam Khomeini, ada tiga lembaga yang sangat penting yang ada dalam pemerintahan Republik Islam Iran, yaitu: Dewan Revolusi Islam (*Revolutionary Council*), Partai Republik Islam (*Islamic Republic Party*), dan Pasadran (Pasukan Pengawal Revolusi Islam). Dewan Revolusi Iran (DRI) dibentuk tiga bulan sebelum kejatuhan Syah. Dewan ini dibentuk dengan tujuan meletakkan dasar-dasar negara Republik Islam Iran sebagaimana dikehendaki Khomeini dalam

<sup>13</sup> Riza Sihbudi, “Politik Parlemen dan Oposisi di Iran Poca Revolusi “ dalam *Jurnal Ilmu Politik Vol. 11*, (Jakarta : 1991), hlm. 33

<sup>14</sup> Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran, dari Jatuhnya Syah hingga Wafatnya Ayatullah Khomeini* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989), hlm. 63.



gagasannya tentang *wilayatul faqih*.<sup>15</sup> Setelah berfungsinya pemerintahan Republik Islam Iran, DRI (Dewan Revolusi Iran) mulai menjalankan peranannya sebagai lembaga legislatif, dengan tugas utama membuat rancangan Undang Undang Dasar, mempersiapkan referendum, dan menjalankan pemerintahan sementara, namun setelah kejatuhan Presiden Mehdi Bazagan, DRI (Dewan Revolusi Iran) memegang peranan sebagai lembaga legislatif dan lembaga eksekutif sekaligus. Peranan ini dijalankan sampai berakhirnya masa tugas dewan ini, yaitu setelah terbentuknya parlemen hasil pemilihan umum tahun 1980. Setelah itu DRI (Dewan Revolusi Iran) kemudian dibubarkan oleh Khomeini.

Kekuasaan legislatif melaksanakan prosedurnya melalui Majelis Syura Islami yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang terpilih. Perundang-undangan yang disahkan oleh majelis diteruskan kepada lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif untuk penerapannya, setelah menyelesaikan berbagai tahap. Dalam masalah-masalah penting mengenai masa depan negara, persetujuan undang-undang itu dapat diperoleh dengan rujukan langsung kepada suara rakyat. Permintaan untuk melakukan referendum harus disetujui oleh dua pertiga dari seluruh jumlah anggota Majelis.

Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh presiden dan para menteri, kecuali dalam hal-hal dimana pemimpin secara langsung bertanggungjawab menurut Undang-undang. Kekuasaan yudikatif dilaksanakan melalui pengadilan, yang harus didirikan di atas dasar prinsip-prinsip Islam dan yang akan menyelesaikan persengketaan, melindungi hak-hak umum dan perluasan wilayah, administrasi keadilan, serta pelaksanaan perintah-perintah Ilahi.<sup>16</sup> Ketiga lembaga negara tersebut di atas, mempunyai kedudukan dan fungsinya masing-masing.

### KONSEP WILAYAT AL-FAQIH

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa revolusi Islam Iran yang terjadi pada akhir dekade 70-an, telah berhasil meruntuhkan kekuasaan monarki absolut yang telah dikuasai oleh Dinasti Pahlevi. Revolusi Islam ini telah melahirkan paradigma baru mengenai sistem pemerintahan di Iran. Sistem politik dan bentuk negara Iran berubah, dari monarki absolut menjadi sebuah republik Islam. Perbedaan yang paling mencolok di antara keduanya adalah, jika sebelum revolusi Iran merupakan sebuah negara sekuler, maka Iran pasca-revolusi bisa disebut

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>16</sup> Pasal 60 dan 6, *Konstitusi*, t. t.



sebagai sebuah negara “teo-demokratis” yang didominasi kaum Mullah (ulama Syi’ah).<sup>17</sup>

Inilah yang melatarbelakangi munculnya sistem pemerintahan Republik Islam Iran dalam bentuk *wilayatul faqih* yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan (*wilayatul al-amr*), dan kepemimpinan agama. Dalam konstitusi Iran, Undang-Undang Dasar harus mempersiapkan lahan bagi seorang *faqih* yang memenuhi persyaratan yang diakui sebagai pemimpin oleh rakyat. “Pengaturan urusan-urusan adalah di tangan orang-orang yang alim tentang Allah, yang terpercaya dalam urusan yang menyangkut apa yang diharamkan dan di haramkan Allah” (Hadis), sebagai bagian dari kewajiban Islam yang sejati, untuk mencegah setiap penyelewengan oleh berbagai organ negara dan tugas-tugas Islam yang hakiki.<sup>18</sup>

Imam Khomeini yang mempunyai peran sangat penting terhadap berdirinya Republik Islam Iran. Di bawah pimpinan Khomeini, seorang pemimpin besar keagamaan yang keputusan-keputusannya diikuti, menyadarkan perlunya gerakan mengikuti akidah Islam yang sejati dalam perjuangannya. Rencana pemerintahan Islam yang didasarkan *wilayatul faqih* yang kemudian disarankan oleh Imam Khomeini pada puncak rezim despotik Pahlevi, memberikan motivasi dan harapan yang jelas terhadap masyarakat Iran akan adanya perubahan pemerintahan di Iran.

Bulan Januari 1979, ketika menulis gagasannya mengenai draft konstitusi pemerintahan Islam di tempat pengasingannya di Paris, Imam Khomeini ditanya mengenai bentuk negara dan pemerintahan Islam apa yang di cita-citakannya, ia menjawab, “seperti sepuluh tahun pemerintahan Rasulullah atau lima tahun pemerintahan Imam Ali bin Abi Thalib”. Bagi Imam Khomeini, “Negara Islam” seperti Arab Saudi, Libia dan lainnya bukanlah contoh dari sebuah negara Islam yang berhasil dan patut ditiru.<sup>19</sup>

Menurut Khomeini bentuk pemerintahan Islam setidaknya mencakup dua kriteria, Pertama, pemerintahan tersebut harus didasarkan pemilihan umum. Khomeini mengatakan; “Seluruh anggota masyarakat ikut bertanggungjawab atas terpilihnya seseorang yang mampu dan bersedia membentuk republik tersebut. Seluruh rakyat memiliki hak untuk memilih dengan bebas”.<sup>20</sup> Kedua, mengenai orang yang terpilih dan doktrin politik,

<sup>17</sup>Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan*, hlm. 50-51.

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>Sihbudi, *Biografi*, hlm. 78.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 78.



ekonomi atau masalah sosial lainnya, akan didasarkan pada ajaran Islam. Khomeini mengatakan;

“Dalam pemerintahan yang demikian, pemerintah harus senantiasa melakukan hubungan permanen dengan dewan hasil pilihan rakyat, yang bila mereka tidak menyetujui mengenai suatu hal, pemerintah tak bias mengambil keputusan sendiri. Dan ia yang dipilih rakyat untuk memimpin pemerintahan Islam harus benar-benar memiliki berbagai kondisi yang menjamin kepatuhan kepada rakyat Islam dan bukan mewakili sekelompok minoritas. Sedangkan konstitusi dalam pemerintahan itu dibuat dengan prinsip-prinsip yang benar-benar terbukti berasal dari Qur'an dan tradisi Islam”.<sup>21</sup>

Masih pada tahun 1979, pasca terjadinya revolusi, rumusan rancangan Konstitusi RII (Republik Islam Iran) yang telah ditulis sejak Imam Khomeini di Paris kemudian diumumkan. Begitu juga rancangan UUD rumusan Dewan Revolusi (rancangan keempat) yang menjadikan semua rumusan sebagai masukannya. Rumusan yang berisi 12 bab dan 151 pasal itu kemudian dipublikasikan kepada masyarakat. Pasal ke-3 dan ke-15 rumusan ini menyebutkan bahwa suara mayoritas merupakan prinsip negara dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Sementara keislaman sistem negara didukung oleh Dewan Garda Republik Islam Iran. Namun di sana tidak tercatat kata *wilayatul faqih*.

Imam Khomeini kembali memberikan waktu selama kurang lebih 1 bulan kepada seluruh komponen masyarakat untuk memberikan masukan. Sejarah mencatat bahwa pada musim panas tahun 1979, media massa dipenuhi oleh berbagai macam pandangan. Mereka yang berlatar belakang agama memberikan penekanan lebih atas pengawasan *faqih* terhadap sistem negara dibanding konstitusi bersyarat yang dihasilkan oleh revolusi konstitusi. Perlahan-lahan kondisi ini bergeser dan mulai bermunculan pandangan dari sebagian mereka, baik yang bukan dari kalangan rohaniwan. Mereka bersama-sama dengan para *maraji'* memunculkan ide *wilayatul faqih*. Dan masalah ini terus bergulir bagai bola salju yang pada akhirnya mereka meminta agar *wilayatul faqih* dimasukkan ke dalam rumusan UUD Republik Islam Iran.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan*, hlm. 78-79.

<sup>22</sup> *Ibid.*



## KONTRIBUSI PEMIKIRAN IMAM KHOMEINI PADA MASA SEKARANG

Imam Khomeini yang mempunyai peran sangat penting terhadap berdirinya Republik Islam Iran. Dibawah pimpinan Khomeini, seorang pemimpin besar keagamaan yang keputusan-keputusannya diikuti, menyadarkan perlunya gerakan mengikuti akidah Islam yang sejati dalam perjuangannya. Rencana pemerintahan Islam yang didasarkan *wilayatul faqih* yang kemudian disarankan oleh Imam Khomeini pada puncak rezim despotik Pahlevi, memberikan motivasi dan harapan yang jelas terhadap masyarakat Iran akan adanya perubahan pemerintahan di Iran. Imam Khomeini berhasil menjatuhkan kekuasaan rezim Syah tahun 1979, maka dikenallah istilah *Wilayat al-Faqih* (kekuasaan para faqih) atau wilayah ahli hukum Islam sebagai bentuk sistem pemerintahan Iran modern. Dengan sistem baru ini, maka Islam Syi'ah telah mengawali suatu babak baru sistem pemerintahan yang menunjukkan kemajuan ke arah sistem demokrasi yang berbentuk "Republik".

Khomeini melaksanakan sistem pemerintahan Islam Iran modern mengkolaborasikan antara paham keagamaan Syi'ah dengan paham demokrasi Barat. Paham keagamaannya tercermin dalam konsep Wilayat al-Faqih, sedangkan sistem demokrasi Barat-nya terlihat dalam bentuk negara "republik" dan pembagian kekuasaan antara eksekutif, yudikatif dan legislatif.<sup>23</sup> Hal ini membuat Negara Iran memiliki khas dan unik tersendiri di dalam sistem pemerintahannya.

Khomeini di dalam sistem pemerintahan Iran juga mengadopsi dan menggunakan teori "Trias Politika" seperti yang dipraktekkan dalam negara-negara sistem demokrasi. Teori Trias Politika sendiri pertama kali diperkenalkan oleh John Locke (1632-1704) dan kemudian dikembangkan oleh Montesquieu (1689-1755) yang memisahkan kekuasaan (*separation of power*) menjadi tiga bagian; Pertama, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*application function*); Kedua, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat undang-undang (*rulemaking function*), dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*).<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Rahmat, Jalaluddin, "Demokrasi Tanpa Batas: Melihat Pemilu di Iran", dalam *Republika*, 15 Januari 1993.

<sup>24</sup>Lihat dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 151-158.



Gagasan yang paling menonjol dalam kontribusi pemikiran politik Imam Khomeini adalah idenya tentang *Wilayatul Faqih* (pemerintahan para faqih) yang pada dasarnya menghendaki agar kepemimpinan pada umumnya, termasuk kepemimpinan politik, harus berada di tangan terpercaya. Pemikiran politik Imam Khomeini mengenai *Wilayatul Faqih* yang menjadi bagian terpenting dalam sistem politik Republik Islam Iran ini memberikan tekanan pada imamah yang diartikan sebagai kepemimpinan agama dan politik yang sekaligus disandang oleh *faqih*. Dalam hal ini para ulama pada saat itu memiliki otoritas tertinggi dan mengangkat harkat dan martabat ulama sendiri.

## PENUTUP

Konsep *wilayatul faqih* lahir di tengah-tengah kancah ideologi politik Islam yang tengah mengalami kebuntuan terhadap berkembangnya politik Islam, konsep *wilayatul faqih* ini hadir dengan cara berfikir yang sama sekali baru. Konsep yang secara resmi dituangkan di dalam konstitusi Republik Islam Iran ini, ditandai dengan kedekatan hubungannya dengan doktrin Syi'ah dan keberhasilannya dalam menyelaraskan syari'at dengan cita-cita demokrasi. Hal ini meliputi otoritas dalam sistem hukum Islam (perwakilan politik oleh seorang *mujtahid* yang adil dan arif) dan peran demokratis rakyat dalam sistem distribusi kekuasaan.

Akan tetapi gagasan *wilayatul faqih* bukannya tidak mengandung segi-segi kelemahan dan kekurangan. Salah satunya adalah mengenai persoalan kriteria faqih yang bisa diangkat menjadi pemimpin. Jelaslah sangat sulit memenuhi seorang faqih yang bisa memenuhi kriteria itu. Sementara itu, bagi para pengkritik dan pengecamnya, konsep *wilayatul faqih* dipandang telah memberikan peranan yang terlalu besar kepada ulama dalam urusan kenegaraan.

## DAFTAR BACAAN

Abd. Rahman Zainuddin dan dan M. Hamdan Basyar, *Syi'ah Dan Politik Di Indonesia: Sebuah Penelitian* (Bandung: Penerbit Mizan, 2000),

David Menhasri, *Iran: A Decase of War and Revolution* (New York: Holmes & Meier, 1990)

M. Naim Turfan, entri "Mustafa Kemal Atatürk", dalam Esposito, *Ensiklopedi*



Meuleman, Johan Hendrik, *Dinamika Abad Ke-20*, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 6 (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005)

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2003)

Mortimer, *Islam dan Kekuasaan*, hlm. 307-310; Ayatullah Ruhullah Khomeini, "Sebuah Pandangan Mengenai Pemerintahan Islam" Dalam *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, editor: Salim Azzam (Bandung: Penerbit Mizan, 1983)

Riza Sihbudi, " Politik Parlemen dan Oposisi di Iran Paca Revolusi " dalam *Jurnal Ilmu Politik Vol. 11*, (Jakarta : 1991)

\_\_\_\_\_, *Dinamika Revolusi Islam Iran*, dari Jatuhnya Syah hingga Wafatnya Ayatullah Khomeini (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989)

Shireen T. Hunter, "Islam in Power: The Case of Iran", dalam *The Politic of Islamic Revivalism*, editor: Shireen T. Hunter (Bloomington: Indiana University Press, 1983)

Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002)